RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan I-1

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS I-1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS I-4

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS I-4

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah II-1

Bab III Prioritas Belanja Daerah III-1

Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan..... IV-1

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan IV-1

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan IV-6

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga IV-7

Bab V Rencana Pembiayaan Daerah V-1
Bab VI Penutup VI-1

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018 II-1
Tabel 3.1 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo III-4
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan IV-1
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 IV-6
Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 IV-7
Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada aspirasi dan kebutuhanmasyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang berkualitas. Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu dilakukan perencanaan yang realistis, rasional dan akuntabel agar pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjaga sinergi antara perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mutlak disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengacu pada dokumen perencanaan baik dari pusat maupun daerah. Karena APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, penetapan kebijakan yang tepat terkait APBD yang meliputi target pendapatan,

pengeluaran dan pembiayaan daerah akan menunjukkan kualitas penyelenggaran pemerintah daerah tersebut.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah juga mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD yang menjadi acuan dalam pembuatan KUA-PPAS merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program-program prioritas Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Implementasinya, perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus dapat mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Demikian pula RKPD harus dapat menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD. Secara komprehensif, Pemerintah Daerah memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di daerah mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Dalam hal kewenangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bidang kewenangan yang menjadi urusan bersama (*konkuren*) yang meliputi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Untuk urusan wajib tersebut terdiri dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Implementasi dari penyelenggaraan urusan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara itu, untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkaitan dengan hal di atas agar penyelenggaran urusan pemerintahan tersebut terarah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018. Dokumen PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 pada dasarnya merupakan dokumen penganggaran yang merupakan tindak lanjut dari dokumen KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan PPAS bersamaan dengan penyusunan KUA dan selanjutnya disampaikan sekaligus ke DPRD untuk dibahas dan disepakati. Dengan demikian, maka proses penyusunan PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dilakukan secara simultan dengan penyusunan KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 memuat skala prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PPAS juga memuat prioritas program untuk masing – masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKPD. Selain itu, PPAS juga menguraikan pagu anggaran sementara masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara Perangkat Daerah dalam Dokumen PPAS tersebut setelah disepakati, maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RAPBD. Selanjutnya pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah:

1. Menentukan skala prioritas.
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.
3. Menyusun Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
4. Sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan prioritas dan patokan batas maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program/kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat daerah (RKA-PD).
5. Sebagai dasar penilaian kinerja pelayananan daerah dalam satu tahun anggaran.

1.3. Dasar Penyusunan

Adapun dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 TambahanLembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 33).

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi; dan (3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya.

Secara umum pada tahun 2018, Pendapatan Daerah turun sebesar 2,09% jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2017 yang dikarenakan adanya penurunan di beberapa pos pendapatan seperti pada retribusi daerah, dana alokasi umum, dana akolasi khusus, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 2.1

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun Anggaran 2018

Uraian	APBD TA 2017	RAPBD 2018	Bertambah/Berkurang	
			Rp	(%)
PENDAPATAN DAERAH	**3.850.639.404.011,04**	**3.770.220.986.187,41**	**(80.418.417.823,63)**	**(2.09)**
Pendapatan Asli Daerah	**1.310.069.237.292,04**	**1.422.737.844.937,41**	**112.668.607.645,37**	**8.60**
Hasil Pajak Daerah	794.975.000.000,00	861.230.000.000,00	66.255.000.000,00	8.33
Hasil Retribusi Daerah	94.920.694.000,00	83.487.103.840,00	(11.433.590.160,00)	(12.05)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.447.734.565,97	29.847.768.975,41	1.400.034.409,44	4.92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	391.725.808.726,07	448.172.972.122,00	56.447.163.395,93	14.41
Dana Perimbangan	**1.940.311.823.627,00**	**1.666.483.141.250,00**	**(273.828.682.377,00)**	**(14.11)**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	155.827.511.627,00	157.243.700.000,00	1.416.188.373,00	0.91
Dana Alokasi Umum	1.314.001.701.000,00	1.203.737.401.000,00	(110.264.300.000,00)	(8.39)
Dana Alokasi Khusus	470.482.611.000,00	305.502.040.250,00	(164.980.570.750,00)	(35.07)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**600.258.343.092,00**	**681.000.000.000,00**	**80.741.656.908,00**	**13.45**
Pendapatan Hibah		140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100.00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	330.752.731.092,00	337.000.000.000,00	6.247.268.908,00	1.89

Uraian	APBD TA 2017	RAPBD 2018	Bertambah/Berkurang	
			Rp	(%)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	269.430.612.000,00	204.000.000.000,00	(65.430.612.000,00)	(24.28)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	(100.00)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**3.850.639.404.011,04**	**3.770.220.986.187,41**	**(80.418.417.823,63)**	**(2.09)**

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 3.770.220.986.187,41 dengan komposisi target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.422.737.844.937,41 atau 37,73% dari total APBD, Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 1.666.483.141.250,00 atau sebesar 41,56% dari total APBD, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 681.000.000.000,00 atau sebesar 16,98% dari total APBD.

Target PAD yang diperoleh dari Pajak Daerah ditargetkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 861.230.000.000,00 naik sebesar 8,33% atau dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 794.975.000.000,00. Pada tahun 2018, kontribusi yang tertinggi untuk Pajak Daerah disumbang dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 270.000.000.000,00; penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yakni sebesar Rp 268.000.000.000,00; dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB sebesar Rp 201.290.000.000,00.

Untuk Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 12,05% pada tahun 2018, dimana pada tahun pada tahun 2017 sebesar Rp 94.920.694.000,00 menjadi sebesar Rp 83.487.103.840,00. Penurunan Retribusi Daerah disebabkan oleh antara lain (1) terdapat perpindahan pencatatan retribusi pelayanan kesehatan ke pos lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) penurunan penerimaan retribusi jasa usaha sebesar 6,73% dari semula pada tahun 2017 sebesar Rp 34.768.088.500,00 menjadi Rp 32.427.342.000,00, (3) penurunan penerimaan retribusi perizinan tertentu sebesar 6,63% dari semula Rp 32.935.991.500,00 menjadi Rp 30.752.340.840,00.

Sedangkan untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan pada tahun 2018 sebesar Rp 29.847.768.975,41 atau mengalami kenaikan sebesar 4,92%. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yakni: (1) Peningkatan penerimaan PDAM Delta Tirta sebesar Rp 1.220.000.000,00; (2) Peningkatan penerimaan PD. Aneka Usaha sebesar Rp

106.613.662,00; (3) Peningkatan penerimaan BPD Delta Artha sebesar Rp 400.000.000,00. Namun di sisi lain terdapat penurunan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jatim sebesar Rp 326.579.252,56.

Target Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 14,11% atau pada tahun 2017 sebesar Rp 1.940.311.823.627,00 menjadi Rp 1.666.483.141.250,00. Penurunan dana perimbangan bersumber dari adanya penurunan dana alokasi umum sebesar 8,39% atau pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 1.314.001.701.000,00 dan diproyeksikan menjadi Rp 1.203.737.401.000,00 pada tahun 2018. Penurunan dana perimbangan juga bersumber dari adanya penurunan dana alokasi khusus sebesar 35,07% dimana pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 470.482.611.000,00 menjadi diproyeksikan di tahun 2018 sebesar Rp 305.502.040.250,00. Sedangkan pos dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,91% pada tahun 2018 dari semula pada tahun 2017 sebesar Rp 155.827.511.627,00 menjadi Rp 157.243.700.000,00.

Pada Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018 diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk pendapatan dari pendapatan hibah diproyeksikan sebesar Rp 140.000.000.000,00 pada tahun 2018, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan sebesar Rp. 337.000.000.000,00. Nominal tersebut mengalami peningkatan 1,89% dari anggaran tahun 2017. Sedangkan pada pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah pada tahun 2018 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 24,28% atau pada tahun 2017 sebesar Rp 269.430.612.000,00 menjadi Rp 204.000.000.000,00 pada tahun 2018. Sehingga pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 681.000.000.000,00 atau naik sebesar 13,45% dibanding tahun sebelumnya.

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 merupakan tindak lanjut dan penjelasan lebih detail dari program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016–2021. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dan proyeksi pencapaian kinerja pemerintah sebelumnya. Prioritas pembangunan tahun 2018 merupakan pedoman yang mengarahkan pola pembangunan berupa program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah agar fokus pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sidoarjo.

Fokus prioritas pembangunan 2018 ditetapkan berdasarkan penjabaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Dengan adanya fokus prioritas pembangunan 2018, diharapkan mampu mengarahkan semua Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan Tahun 2018 tetap memperhatikan sinergitas antara pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur hingga prioritas pembangunan nasional. Berikut ini adalah gambaran prioritas, fokus serta program pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tahun 2018 :

Prioritas 1 :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Peningkatan kualitas pelayanan publik
b) Pengembangan ketatalaksanaan paska restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah
c) Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM aparatur
d) Pengembangan *e-government* yang terintegrasi
e) Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang efektif

Prioritas 2 :

Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang

berbasis pada potensi unggulan daerah. Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
b) Pemberdayaan ekonomi lokal dan perluasan kesempatan kerja
c) Pengembangan produk unggulan daerah yang berdaya saing global
d) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang inovatif
e) Peningkatan upaya intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis agrobisnis

Prioritas 3 :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.

Prioritas 4 :

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis.Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Peningkatan wawasan kebangsaan.
b) Peningkatan pendidikan politik masyarakat.
c) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.
e) Pengembangan kelestarian budaya lokal.
f) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
g) Penegakan supremasi hukum

Prioritas 5 :

Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.Prioritas ini memiliki beberapa fokus diantaranya:

a) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas,

merata dan sinergis dengan potensi ekonomi daerah.

b) Pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan.

c) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan.

Prioritas pembangunan kabupaten Sidoarjo dituangkan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut (Tabel 3.1) :

Tabel 3.1.
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Tahun 2018
Kabupaten Sidoarjo

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program peningkatan pelayanan perizinan	• Prosentase Perizinan yang Terbit • Prosentase Pelayanan Perizinan tertentu yang tepat waktu sesuai SOP • Prosentasi Kontribusi restribusi • Prosentase Pelayanan Perizinan usaha yang tepat sesuai SOP • Prosentase perizinan terbit	100% 100% 100% 100% 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase naskah produk mutasi yang disampaikan tepat waktu	80%	Badan Kepegawaian Daerah
			Program pelayanan administrasi kependudukan	• Prosentase Penduduk Wajib KK yang sudah memiliki KK • Prosentase Penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP • Prosentase Barpras BIAK yang layak fungsi • Presentase permintaan kebutuhan	96% 80% 80% 75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program peningkatan pelayanan angkut	Presentase masyarakat yang merasa puas	80%	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				dengan pelayanan angkutan umum		
			Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD	• Outcome: Tercukupnya biaya peningkatan pelayanan pada BLUD • Output: Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat pengguna layanan RSUD Kabupaten	85% 75%	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pembinaan Administrasi Pemerintah Umum dan Desa	• Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Administrasi Pemerintah Umum • Rumusan bahan kebijakan dan evalusasi administrasi pemerintahan dan kekayaan desa	6 laporan 3 laporan	Sekretariat Daerah
			Program Administrasi Kerjasama	Program kerjasama yang telah dilaksanakan	100%	Sekretarian Daerah
			Program Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	• Presentase pelayanan pencatatan sipil yang tepat wakti • Persentase kepemilikan akte kelahiran	60% 40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Presentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis	80%	Dinasi Perhubungan
			Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut, udara,	Prosentase penyelenggaraan usaha postel yang sesuai	75%	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			postel	peraturan perundang-undangan		
		Pengembangan Ketatalaksanaan paska restrukturisasi organisasn pemerintahan daerah	Program pendidikan dan pelatihan aparatur	Presentase Kinerja ABN dengan nilai minimal kategori baik		Badan Kepegawaian Daerah
			Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	• Prosentase Implementasi Perencanaan Bidang Pemeratur didalam Pelaksanaan Pembangunan • Prosesntasi Pelaksanaan Koordinasi, Monev Bidang Pemerintahan dan Aparatur	95% 95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daeah
			Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daeah dan Pelayanan Publik	• Prosentase Perangkat Daeah yang merealisasikan target kinerjanya • Prosentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran kelembagannya	80%	Sekretaris Daerah
		Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadao pelayanan administrasi perkantoran	80%	Seluruh perangkat daerah
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarpras aparatur SKPD dengan kondisi layak fungsi	80%	Seluruh perangkat daerah
			Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase aparatur yang disiplin	95%	Seluruh perangkat daerah
			Program peningkatan	Tingkat kelulusan	90%	Seluruh perangkat

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			kapasitas sumber daya aparatur	perserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dikirim dan bersertifikat		daerah
			Program pendidikan dan pelatihan aparatur	Prosentase ABN yang meningkat kompetisinya		Badan Kepegawaian Daerah
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Dokumen hasil penghimpunan notulensi	85%	Sekretariat DPRD
			Program bantuan hokum dan sosial, pembinaan potensi dan kreativitas anggta KORPRI	• Prosentase bantuan hokum dan sosial yang diberikan kepada anggota KORPRI • Prosentase jumlah anggota KORPRI yang memiliki potensi dan kreatifitas		Badan Kepegawaian Daerah
		Pengembangan E-Government yang terintegrasi	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	• Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daeah yang tepat waktu	90%	Seluruh Perangkat Daerah
			Program pelayanan informasi dan pemberitaan, pengelolaan, pengaduan, keprotokolan, dan dokumentasi	• Prosentase tersebar luasnya informasi ke masyarakat • Prosentase pengaduan masyarakat yang direspon • Prosentase cakupan pelayanan keprotokolan	90% 90% 90%	Sekretariat Daerah
			Program koordinasi kebijakan dan pelayanan	Prosentase perangkat daerah yang telah	55%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			bidang telematika dan persandian	menerapkan telematika dan persandian		
		Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan yang efektif	Program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	• Prosentase capaian kinerja program PD bidang ekonomi dengan capaian >75% • Prosentase hasil rapat koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti • Prosentase dokumen perencanaan PD bidang Ekonomi berkualitas baik	100% 100% 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	• Prosentase hasil rapat koordinasi bidang Penmas yang ditindaklanjuti • Prosentase capaian kinerja program bidang penmas terhadap perencanaan	80% 80%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah	• Prosentase dokumen perencanaan RKPD yang sesuai dengan arahan dalam dokumen tata ruang • Prosentase hasil rapat koordinasi bidang PD pengembangan wilayah, pemukiman dan praswil yang ditindaklanjuti	60% 75% 85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				• Prosentase capaian kerja program bidang PD bidang pengembangan wilayah permukiman dan praswil >75% • Prosentase dokumen perencanaan berkualitas baik pelaksanaan pembangunan	80%	
			Program penyusunan, monev, data perencanaan pembangunan, dan kebijakan anggaran	• Prosenrtase pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan pembangunan daerah • Prosentase konsistensi dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	75% 70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penelitian dan pengembangan	• Prosentase hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti • Prosentase isu strategis daerah yang sudah diteliti	100% 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program koordinasi rumusan kebijakan pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan	• Prosentase rumusan kebijakan bidang infrastruktur yang ditindaklanjuti • Prosentase ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa yang dilelang oleh ULP sesuai target waktu	100% 100%	Sekretariat Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				• Prosentase laporan penyelenggaraan kinerja daerah dan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Prosentase OPD dan desa yang akuntabilitas kinerja dan keuangannya baik	25%	Inspektorat
2.	Meningkatkan inovasi, kemandirian, dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -sumber pendapatan daerah	Program pengembangan penyediaan sarpras dan peningkatan pelayanan infrastruktur melalui pendapatan pasar rakyat	Prosentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan sarana prasarana, peningkatan pelayanan dan pendapatan pasar	70%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program peningkaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan pasar	Prosentase pasar yang aman, tertib, dan bersih sesuai dengan standart tertentu	18%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program pengembangan dan peningkatan pendapatan pasar	Prosentase kenaikan nilai restribusi pasar	3%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program pengebangan objek, promosi, dan usaha pariwisata	• Jumlah objek pariwisata yang dikembangkan • Jenis dan jumlah media promosi wisata • Jumlah lembaga wisata yang dibina • Jumlahpemandu wisata yang dibina • Festival wisata dan gelar wisata daerah	6 Objek 10 jenis 6 lembaga 6 orang 10 kegiatan 6 objek	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				• Jumlah objek wisata yang dimonitor • Jumlah peserta pemilihan duta wisata Guk dan Yuk Sidoarjo • Jumlah rekomendasi teknis pariwisata • Jumlah pariwisata yang dimonev	60 orang 1 teknisi 1 usaha	
			Program Peningkatan dan pengambangan pajak daerah	Prosentase Pajak Daerah Terhadap PAD	100%	Badan Penyelenggara Pajak daerah
			Program pendataan peningkatan dan pengembangan pajak daerah	• Prosentase pertumbuhan pajak daerah • Prosentase data dan informs yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebutuhan pengembangan pajak daerah • Prosentase pengembangan pajak daerah yang diimplementasikan	10% 70% 70%	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Program peningkatan dan pengembngan pengeolaan aset daerah	• Jumlah pemanfaatan, pemindahan, dan penghapusan BUMD • Prosentase ketepatan waktu	2 kegiatan 90%	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Pemberdayaan ekonomi lokal dan	Program koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Prosentase rumusan dan hasil monev kebijakan	20%	Secretariat daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
		perluasan kesempatan kerja	kebijakan bidang perekonomian,pertanian dan BUMD	bidang perekonomian, pertanian, dan BUMD		
			Program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi dan usaha mikro	• Prosentase usahamikro yang memiliki unit usaha yang aktif • Prosentase koperasi yang meiliki unit usaha yang aktif	10% 10%	Dinas koperasi dan Usaha Mikro
			Program peningkatan pemanfaatan bantuan permodalan	Prosentase usaha koperasi dan UMKM yang eksis setelah mendapat bantuan permodalan	1500 orang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Program peningkatan, pertumbuhan, dan pengembangan usaha industri	Jumlah usaha industri nyang tumbuh dan berkembang	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustria
			Program peningktan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja	• Pertumbuhan jumlah presentase lembaga pelatihan terakreditasi • Presentase peserta pelatihaan yang lulus ujian kompetensi	15% 70%	Dinas Tenaga Kerja
			Program pengambangan dan perlindungan lembaga ketenagakerjaan	Prosentase kejadian unjuk rasa masalah perburuhan yang diseleseikan	100%	Dinas Tenaga Kerja
			Programpengawasn ketenagakerjaan	Rata-rata angka kecelakaan kerja di perusahaan industri	2635 perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
			Program peningkatan kesempatan kerja dan	• Pertumbuhan (prosentase peningkatan	50%	Dinas Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			penyelenggaraan transmigrasi	jumlah) pencari kerja yang berhasil ditempatkan • Prosentase peserta bimtek TKMT dan kewirausahaan yang telah membuka usaha • Prosentase transmigran yang berhasil bekerja sendiri/ membuka usaha • Prosentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk	5% 6%	
			Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase desa yang melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif	20%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
			Program koordinasi, fasilitasi dan Monev pemberdayaan usaha ekonomi dan sumber daya alam	• Jumlah desa yang dibina pemberdayaan sosial dan budayanya • Jumlah peserta sosialisasi perlindungan tenaga kerja informal	353 desa/Kel 400 orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
		Pengembangan produk unggulan daerah yang berdaya saing global	Program peningkatan daya saing pasar dan produk lokal	• Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	10%	Dinas perdagangan dan peridustrian

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
		Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang inovatif	Program penguatan energi dan sumber daya mineral bagi penumbuhan usaha	Produktifitas usaha sektor pertambangan	12 bulan	Dinas perdagangan dan peridustrian
		Peningkatan upaya intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis agrobisnis	Program peningkatan penganekaragaman, keawaspadaan pangn dn gizi	Pengembangan penganekaragaman kewaspadaan pangan dan gizi		Dinas Pangan dan Pertanian
			Program pemberdayaan penyuluhan pertanian dan perikanan	• Prosentase pemanfaatan penyuluh dalam pendampingn • Prosentase pelaku utma yang mendapatkan penyuluhan	60% 60%	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program peningkatan ketersediaan cadangan dan distribusi pangan	• Prosentase pelakasanaan kegiatan yang mendukung peningkatan skor PPH • Prosentase peningkatan cdangan pangan • Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	75% 1.5% 80%	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program peningkatan produksi dan pengamanan perikanan tangkap dan kawasan pesisir	• Prosentase menurunna pelanggaran penangkapan ikan • Prosentase meningkatnya jumlah produksi tangkap	100% 2.4%	Dinas Perikanan
			Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	9 ton	Dinas Perikanan
			Program peningkatan	Jumlah pengusaha yang	24%	Dinas Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			kualitas usaha perikanan	bersertifikat dan memiliki rekomendasi tanda daftar usaha pengolahan perikanan		
			Program peningkatan hasil produksi pertanian	• Prosentase penggunaan benih ungul berlabel • Prosentase lahan yang menggunakan sarpras mekanisasi pertanian • Prosentase serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan dasn holtikultura	80% 80% 70%	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan kualitas produksi peternakan/ kehewanan dan hasil hewan	• Jumlah produksi daging, telor, dan susu • Jumlah produksi daging, telor, dan susu	2% 2%	Dinas Pangan dan pertanian
			Program peningkatan produksi hasi perkebunan dan pengelolaan hasil hutan	• Luasan lahan yang ditanami dan jumlah stock opname kayu olahan • Jumlah produksi perkebunan	1 test 1 test	Dinas Pangan dan Pertanian
3.	Meningkatkan Aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendididikan dan kesehatan	Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan	Program perluasan dan aksesbilitas pendidikan	• Presentase bangunan SDN dalam kondisi baik • APK SMP/MTS • APK SD/MI	75.96% 98.56% 95.83%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program peningkatanmutu dan relevansi layanan pendidikan	Prosntase kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dan pelayanan pendidikan di	92.5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				daerah		
			Program pendidikan dasar	• Rasio Kelas terhadap muri • APM dan APK sekolah dasar • Tingkat kelulusan SD • NIlai NEM • Rasio guru terhadap murid • Prosentase bangunan TK dan SD dalam Kondisi Baik	1:29 107.17 100% 8:23 1:18 95.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program pendidikan Sekolah Menengah	• Rasio kelas terhadap murid • APM dan APK • Rasio Guru terhadap murid • Prosentase bangunan SLTP dan SLTA dalam kondisi baik • Nilai NEM • Tingkat kelulusan SLTP	1:33 untuk SLTP dan 1:36 untuk SLTA 78.17 APM utk SMP/MTS 1:15 98.85% untuk SLTP dan 98.36% untuk SLTA 7.08 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase guru yang berklasifikasi ahli	92.5%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			Program pendidikan anak usia dini dan informal	• APK PAUD • Angka Melek huruf • APS SD dan SMP	92.2% 90% 0.01% dan 0.08%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan budaya bacadan pembinaan perpustakaan	• Prosentase perpustakaan binaan berkategori baik • Indeks gemar membaca • Prosentase tenaga pengelola	62% 28% 100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program pengelolaan kearsipan dan dokumentasi	• Presentase pelayanan kearsipan • Persentase lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan	100% 20%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan aksesbilitas dan kualitas kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	• Jumlah Pengobat tradisional yg memenuhi ijin operasional • Persentase FKTP dengan akreditasi minimal dasar • Persentase FKTL yg memenuhi akreditasi	35 Unit 25 Puskesmas 10 FKTL	Dinas Kesehatan
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	• Persentase Desa/Kel UCI • Persentase desa/kel yg melaksanakan POSBINDU PTM • Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendptkan pemeriksaan sesuai standar • Angka keberhasilan	1 – 100% 100% 90%	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				pengobatan TB		
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	• AKI • AKB • Persentase Balita Stunting • Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan • Persentase usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	100% 100% 100% 100% 100%	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Sumber daya Kesehatan	• Prosentase nakes yg memiliki ijin praktek • Persentase ketersediaan obat dan vaksin • Persentase Puskesmas yg memiliki alat kesehatan sesuai standar • Persentase IRTP yg mendptkan sertifikat (ijin edar)	100% 100% 100% 100%	Dinas Kesehatan
4.	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis	Peningkatan wawasan kebangsaan	Program peningkatan wawasan kebangsaan	• Jumlah kader wawasan kebangsasan • Kategori Kabupaten Peduli HAM	100% 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Peningkatan pendidikan politik mayarakat Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politikya	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan keamanan dan Kenyaman	• Persentase konflik yang berhasil ditangani tepat	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
		masyarakat	Lingkungan	waktu • Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah tepat waktu	100%	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentasi PMKS yang terpenuhi fungsi sosialnya	80%	Dinas Sosial
			Program Pembinaan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	• Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketentraman	80%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Perlindungan Masyarakat	• Prosentase satlinmas yang aktif dalam pengendalian keamanan lingkungan sesuai standar pelayanan minimal (spm)	80%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Kerukunan antar umat beragama	Program Koordinasi kebijakan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Prosentase rumusan kebijakan dan hasil monev bidang kesramas yang telah ditindaklanjuti	100%	Sekretariat Daerah
		Pengembangan Kerukunan kelestarian budaya lokal	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Prosentase kesenian dan kebudayaan daerah yang diaktualisasikan masyarakat	50%	Dinas Pendidikan dan kebudayan
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Prosentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan	51.88 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
		pembangunan yang responsive gender		PUG dan Pemberdayaan Perempuan; • Prosentase lembaga/organisasi yang melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak • Prosentase Lembaga/Organisasi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	34.88 % 10.45 %	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
			Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	• Persentase pencapaian peserta KB Aktif; • Persentase pencapaian peserta KB Baru; • Prosentase kelompok bina keluarga dan institusi masyarakat pedesaan yang mandiri	100 % 100 % 71 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
			Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	Prosentase lembaga keolahragaan yang berprestasi	50%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Program pelayanan pemanfaatan fasilitas keolahragaan	Tingkat kepuasan pengunjung	50%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Peningkatan peran serta kepemudaa	• Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	50 orang 100%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				• Prosentase organisasi kepemudaan yang eksis		
		Penegakkan Supremasi Hukum	Program Fasilitasi penyusunan, Pembahasan,penetapan, dan dokumentasi peraturan daerah dan produk hukum DPRD	• Prosentasi realisasi penetapan produk hokum daerah • Prosentase jumlah permasalahan hokum yang terseleseikan	84%	Sekretariat Daerah
			Program pembinaan, pengawasan dan penegakan perundang-undangan daerah	• Tingkat penurunan pelanggaran per-uu-an daerah (persentase)	15 %	Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Optimalisasi Pembangunan sistem infrastuktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan sinergis dengan potensi ekonomi daerah	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan	• Persentase ketersediaan bagian-bagian jalan dalam kondisi mantab • Prosentase Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan • Prosentase Jalan Aspal dengan Kondisi Baik • Prosentase ketersediaan Jalan Penghubung Pusat Kegiatan Baru	100 % 100 % 100 % 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kebimargaan	• Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan yang berijin • Persentase panjang jalan dan jembatan Kabupaten yang dipelihara	100% 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan	Persentase Sarana	70%	Dinas Perumahan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan	Prasarana Perumahan dalam kondisi baik		dan Kawasan Permukiman
			Program Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan Pengadaan tana	• Persentase pengadaan tanah yang difasilitasi • Persentase permasalahan Pertanahan yang difasilitasi dan diselesaikan sesuai target	75% 90%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih	• Persentase Prasarana Sanitasi dan Air Bersih yang Disediakan sesuai target • Persentase Sarana Prasarana Pemukiman berkondisi baik • Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni sesuai Target • Persentase Prasarana Sanitasi dan Air Bersih yang Disediakan sesuai target	94.4% 90% 90% 94.4%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan	• Persentase dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan teknis tata bangunan • Persentase bangunan gedung negara layak fungsi • Persentase bangunan	100 % 100 % 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				yang memiliki IMB		
		Pengendalian Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	• Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan • Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai rekomendasi teknis izin pengelolaan limbah B3 • Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai rekomendasi teknis ijin pembuangan air limbah • Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan	9.09 % 11.43 % 2.44 % 59 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	• Presentase pelaku usaha dan kegiatan yang wajib izin lingkungan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang LH • Presentase penyelesaian penanganan pengaduan, sengketa lingkungan dan penegakan hukum masyarakat • Presentase kelembagaan	2.18 % 100 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
				kelompok masyarakat peduli lingkungan	21 %	
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan	• Presentase RTH Publik perkotaan yang dikelola • Presentase PJU yang terbangun	0.28 % 72.6 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Program pencegahan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan	• Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan tanggap darurat dan manajemen logistik bencana • Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pencagahan dini dan kesiapsiagaan bencana	80 % 100 %	Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD)
			Program peningkatan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran	• Prosentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai standart respon • Prosentase capaian kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran	75% 80%	Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD)
			Program penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Prosentase jumlah korban bencana yang direhabilitasi atau direkonstruksi	100%	Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD)
			Program Perencanaan,	Prosentase jaringan	100%	Dinas Pekerjaan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Program	Program Prioritas	Kinerja		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	
			Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemanfaatan	irigasi yang dibangun atau direhab		Umum dan Tata Ruang
			Program operasi, pemeliharaan jaringan irigasi dan penanganan banji	• Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik • Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi • Persentase luas genangan air yang tertangani	100 % 100 % 100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Perangkat Daerah seperti yang ada dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.	**URUSAN WAJIB**	**1.620.836.102.336,00**
1.01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**1.362.912.807.578,00**
1.01.01	**Pendidikan**	**216.855.538.750,00**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.855.538.750,00
1.01.02	**Kesehatan**	**576.812.322.587,00**
	Dinas Kesehatan	197.074.012.587,00
	RSUD	379.738.310.000,00
1.01.03	**Pekerjaan Umum**	**502.891.354.641,00**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	502.891.354.641,00
1.01.04	**Perumahan Rakyat**	**36.666.990.000,00**
	Dinas Perumahan dan Pemukiman	36.666.990.000,00
1.01.05	**Ketentraman. Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**	**11.611.935.000,00**
	Satuan Polisi Pamong Praja	11.611.935.000,00
1.01.06	**Sosial**	**18.074.666.600,00**
	Dinas Sosial	18.074.666.600,00
1.02	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	**257.923.294.758,00**
1.02.01	**Tenaga Kerja**	**4.624.918.200,00**
	Dinas Tenaga Kerja	4.624.918.200,00
1.02.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**2.884.140.400,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	2.884.140.400,00
1.02.03	**Pangan**	**2.800.803.500,00**
	Dinas Pangan dan Pertanian	2.800.803.500,00
1.02.04	**Pertanahan**	**15.295.010.000,00**
	Dinas Perumahan dan Permukiman	15.295.010.000,00
1.02.05	**Lingkungan Hidup**	**143.746.061.700,00**
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	143.746.061.700,00

1.02.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**7.695.742.921,00**
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.695.742.921,00
1.02.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5.970.564.850,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	5.970.564.850,00
KODE	**URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH**	**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**
1.02.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**4.395.685.250,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	4.395.685.250,00
1.02.09	**Perhubungan**	**21.449.027.572,00**
	Dinas Perhubungan	21.449.027.572,00
1.02.10	**Komunikasi dan Informatika**	**8.813.123.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.813.123.000,00
1.02.11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**	**13.563.954.000,00**
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	13.563.954.000,00
1.02.12	**Penanaman Modal**	**4.833.457.615,00**
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.833.457.615,00
1.02.13	**Kepemudaan dan Olahraga**	**12.819.740.000,00**
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	12.819.740.000,00
1.02.14	**Statistik**	**548.252.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	548.252.000,00
1.02.15	**Persandian**	**338.625.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.625.000,00
1.02.16	**Kebudayaan**	**2.229.199.750,00**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.229.199.750,00
1.02.17	**Perpustakaan**	**5.202.347.700,00**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.202.347.700,00
1.02.18	**Kearsipan**	**712.641.300,00**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	712.641.300,00
2	**URUSAN PILIHAN**	**78.169.597.735,00**
2.01	**Kelautan dan Perikanan**	**10.302.859.000,00**
	Dinas Perikanan	10.302.859.000,00
2.02	**Pariwisata**	**2.745.275.000,00**
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.745.275.000,00
2.03	**Pertanian**	**29.369.946.480,00**
	Dinas Pangan dan Pertanian	29.369.946.480,00
2.04	**Perdagangan**	**32.117.560.455,00**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.117.560.455,00
2.05	**Perindustrian**	**1.533.875.000,00**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.533.875.000,00
2.06	**Transmigrasi**	**2.100.081.800,00**
	Dinas Tenaga Kerja	2.100.081.800,00
3.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**52.875.621.456,00**
3.01	**Inspektorat**	**2.319.994.925,00**
	Inspektorat	2.319.994.925,00
3.02	**Perencanaan**	**10.207.060.000,00**

	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.207.060.000,00
3.03	**Keuangan**	**16.372.538.500,00**
	Badan Pelayanan Pajak Daerah	7.085.910.300,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.286.628.200,00
3.04	**Kepegawaian**	**7.260.597.931,00**
	Badan Kepegawaian Daerah	7.260.597.931,00
KODE	**URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH**	**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**
3.05	**Pendidikan dan Pelatihan**	**2.722.490.100,00**
	Badan Kepegawaian Daerah	2.722.490.100,00
3.06	**Penelitian dan Pengembangan**	**992.940.000,00**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	992.940.000,00
3.07	**Penanggulangan Bencana Daerah**	**13.000.000.000,00**
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.000.000.000,00
4	**PENDUKUNG**	**102.339.239.834,00**
4.01	**Sekretariat Daerah**	**30.254.239.834,00**
	Sekretariat Daerah	30.254.239.834,00
4.02	**Sekretariat DPRD**	**72.085.000.000,00**
	Sekretariat DPRD	72.085.000.000,00
5	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**6.135.593.533,00**
5.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**6.135.593.533,00**
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.135.593.533,00
6	**KEWILAYAHAN**	**46.445.066.572,00**
6.01	Kecamatan Balongbendo	2.412.379.200,00
6.02	Kecamatan Buduran	1.391.000.000,00
6.03	Kecamatan Candi	1.532.210.000,00
6.04	Kecamatan Gedangan	1.415.790.000,00
6.05	Kecamatan Jabon	1.723.886.333,00
6.06	Kecamatan Krembung	2.616.352.712,00
6.07	Kecamatan Krian	3.293.193.000,00
6.08	Kecamatan Porong	3.040.213.800,00
6.09	Kecamatan Prambon	1.968.537.501,00
6.10	Kecamatan Sedati	1.635.736.000,00
6.11	Kecamatan Sidoarjo	7.254.444.935,00
6.12	Kecamatan Sukodono	1.750.738.000,00
6.13	Kecamatan Taman	7.464.414.010,00
6.14	Kecamatan Tanggulangin	2.300.892.000,00
6.15	Kecamatan Tarik	1.425.718.879,00
6.16	Kecamatan Tulangan	1.504.762.000,00
6.17	Kecamatan Waru	1.921.189.783,00
6.18	Kecamatan Wonoayu	1.793.608.419,00
TOTAL		**1.906.801.221.466,00**

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, komposisi belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan daerah diketahui bahwa:

1. Urusan wajib mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 1.620.836.102.336,00;
2. Urusan pilihan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp

78.169.597.735,00;

3. Penunjang urusan pemerintahan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 52.875.621.456,00;
4. Urusan Pendukung mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 102.339.239.834,00;
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai plafon anggaran sementara sebesar 6.135.593.533,00; dan
6. Urusan Kewilayahan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar 46.445.066.572,00.

Plafon anggaran terbesar pada urusan wajib berada pada Urusan Kesehatan yaitu sebesar 576.812.322.587,00 yang berorientasi pada pelayanan dasar kesehatan, kemudian diikuti Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp 502.891.354.641,00 yang berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar dan publik, untuk penanggulangan banjir serta pembangunan jalan cor.

Pada urusan pilihan plafon anggaran untuk urusan pilihan masih didominasi oleh urusan perdagangan sebesar Rp. 32.117.560.455,00 dan urusan pertanian sebesar Rp.29.369.946.480,00. Besarnya anggaran pada urusan pemerintahan pilihan tersebut sesuai dengan potensi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki potensi bidang perdagangan dan pertanian yang diharapkan mampu menjadi potensi ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang potensial. Dengan demikian. diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang nantinya dalam jangka panjang akan meningkatkan PAD.

Pada penunjang urusan pemerintahan, anggaran terbesar pada Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebesar Rp 16.372.538.500,00 yang berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah. peningkatan tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan tata kelola aset daerah. Pada urusan pendukung, anggaran terbesar pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 72.085.000.000,00. Pada urusan kesatuan bangsa dan politik sebesar Rp 6.135.593.533,00. Sedangkan pada urusan kewilayahan sebesar Rp 46.445.066.572,00.

Dari keseluruhan distribusi plafon anggaran sementara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya perhatian utama terhadap pembangunan daerah pada tahun 2018 yang dititik beratkan pada penyediaan infrastruktur umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang lebih terjangkau dan berkualitas. Peningkatan infrastruktur untuk tahun 2018 berada pada posisi pertama, hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan

infrastruktur tetap dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai keberhasilan di bidang ekonomi, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018, dalam tiap Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dijelaskan pada lampiran yang berupa tabulasi yang memuat uraian program, kegiatan, dan plafon anggarannya untuk masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

(Terlampir)

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan dalam tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2018

URAIAN	APBD 2017	RAPBD 2018	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
BELANJA DAERAH	***4.269.179.372.259,04***	***4.010.220.986.187,41***	***(258.958.386.071,63)***	***(6.07)***
Belanja Tidak Langsung	**2.364.632.967.880,04**	***2.103.419.764.721,41***	***(261.213.203.158,63)***	**(11.05)**
Belanja Pegawai	1.586.718.027.514,74	1.413.878.684.442,41	(172.839.343.072,33)	(10.89)
Belanja Hibah	150.112.571.000,00	164.007.926.000,00	13.895.355.000,00	9.26
Belanja Bantuan Sosial	41.911.200.000,00	65.301.920.000,00	23.390.720.000,00	55.81
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	96.942.365.900,00	102.220.143.384,00	5.277.777.484,00	5.44
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	485.948.803.465,30	352.114.380.295,00	(133.834.423.170,30)	(27.54)
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.896.710.600,00	2.896.710.600,00	96.56

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp 1.413.878.684.442,41 atau

67,21% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2018. Anggaran ini diperuntukkan sebagai anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS Daerah dan pejabat daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, dan para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dibandingkan tahun yang lalu, anggaran Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. 172.839.343.072,33 atau 10,89% dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, belanja hibah pada tahun 2018 mengalami kenaikan 9,26% dibandingkan dengan tahun 2017 atau dari semula Rp 1.586.718.027.514,74 menjadi Rp 1.413.878.684.442,41. Kemudian belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar 55,81% di tahun 2018 dari sebesar Rp 41.911.200.000,00 menjadi sebesar Rp 65.301.920.000,00. Untuk belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa mengalami kenaikan sebesar 5,44% di tahun 2018 dari sebesar Rp 96.942.365.900,00 pada tahun 2017 menjadi Rp 102.220.143.384,00. Untuk belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa mengalami penurunan sebesar 27,54% pada tahun 2018 dari sebesar Rp 485.948.803.465,30 menjadi sebesar Rp 352.114.380.295,00. Untuk belanja tidak terduga mengalami kenaikan sebesar 96,56% dari sebesar Rp 3.000.000.000,00 pada tahun 2017 menjadi Rp 5.896.71.600,00 pada tahun 2018.

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2018 mengarahkan penerimaan pembiayaan pada selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan pengembalian dana bergulir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Dari uraian tersebut, maka penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2018

URAIAN	APBD 2017	RAPBD 2018	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	**418.539.968.248.00**	**240,000,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(42.66)**
Penerimaan Pembiayaan	**431.439.968.248.00**	**252,900,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(41.38)**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	418.539.968.248.00	240,000,000,000.00	(178,539,968,248.00)	(42.66)
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	12.900.000.000.00	12,900,000,000.00	-	0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**431.439.968.248.00**	**252,900,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(41.38)**
Pengeluaran Pembiayaan	**12.900.000.000.00**	**12,900,000,000.00**	**-**	**0.00**
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	12.900.000.000.00	12,900,000,000.00	-	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**12.900.000.000.00**	**12,900,000,000.00**	**-**	**0.00**
Pembiayaan Neto	***418.539.968.248.00***	**240,000,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(42.66)**

Penerimaan pembiayaan pada anggaran tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 252.900.000.000,00 yang berasal dari SiLPA sejumlah Rp 240.00.00.000,00. Jumlah tersebut dapat dikatakan realistis berdasarkan perkembangan realisasi anggaran sampai akhir tahun anggaran 2017 dan kondisi kas daerah. Pada tahun anggaran 2018 juga diperkirakan terjadi penerimaan pengembalian dana bergulir sebesar Rp. 12.900.000.000,00

Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan untuk penyertaan modal (investasi daerah) sebesar Rp. 12.900.000.000,00.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Sidoarjo,
BUPATI SIDOARJO

H. SAIFUL ILAH, SH., MHum